

Development Strategy Of Banana Island Marine Tourism (Study on the Tourism Office of West Pesisir Regency)

Strategi Pengembangan Wisata Bahari Pulau Pisang (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)

Yanuar Rikardo ¹⁾

¹⁾ Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ yanuarrikardo2@gmail.com

How to Cite :

Rikardo, Y. (2023). STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA BAHARI PULAU PISANG (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat). *Jurnal ISO*, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v3i2>

ARTICLE HISTORY

Received 20 November 2023]

Revised [20 Desember 2023]

Accepted [25 Desember 2023]

KEYWORDS

Strategy, Tourism, Marine Tourism

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian bertujuan mendeskripsikan Strategi Pengembangan Wisata Bahari Pulau Pisang (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode penetapan informan menggunakan purposive sampling yang 6 orang yang terdiri dari 1 orang kepala dinas, 3 orang kepala bagian, dan 2 orang masyarakat. Informan dalam penelitian ini Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Seksi Promosi Pariwisata dan Budaya, Kepala Bidang, Pengunjung, dan Tokoh Masyarakat Pulau Pisang. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dalam mengembangkan wisata bahari Pulau Pisang telah menjalankan program tahunan tentang pengembangan wisata bahari Pulau Pisang sebagaimana mestinya, hal ini bisa dilihat dari beberapa data indikator pencapaian kerja yang efektif. Namun, ada salah satu hambatan yang terjadi pada penerapan program terselenggaranya peningkatan pembangunan infrastruktur dan objek wisata, dikarenakan kurangnya serapan anggaran untuk kegiatan pembangunan objek wisata Kabupaten Pesisir Barat ditambah lagi tidak maksimal anggaran karena pengajuan revisi anggaran ke pusat kurang cepat turun dan kurang terkoneksi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Padahal di dalam Peraturan Daerah tentang RIPPDA No 07 Tahun 2017 telah dijalankan dengan baik oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat. Perlu disarankan agar pemerintah Kabupaten Pesisir Barat khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat harus mempunyai jiwa kreatif agar pengembangan pariwisata pulau pisang ini dalam pembangunannya terus berjalan.

ABSTRACT

The research aims to describe the Pisang Island Marine Tourism Development Strategy (study at the West Pesisir Regency Tourism Office). The type of research used is descriptive-qualitative. The method for determining informants used purposive sampling of six people, consisting of 1 department head, 3 department heads, and 2 community members. The informants in this research were Head of the Tourism Service, Head of the Tourism and Culture Promotion Section, Head of Division, Visitors, and Community Figures on Pisang Island. The data analysis method used is descriptive-qualitative. Based on the results of research and discussion, it is known that the West Pesisir Regency Tourism Office, in developing Pisang Island marine tourism, has carried out an annual programme regarding the development of Pisang Island marine tourism as it should be. This can be seen from several data indicators of effective work achievement. However, there is one obstacle that occurs in the implementation of the programme for increasing infrastructure and tourist attraction development due to the lack of budget absorption for tourism attraction development activities in Pesisir Barat Regency, plus the budget is not optimal because the proposed budget revision to the centre is not submitted quickly enough, and there is a lack of connection between the regional and central governments. In fact, the Regional Regulation concerning RIPPDA No. 07 of 2017 has been well implemented by the West Pesisir Regency Tourism Office. It is necessary to suggest that the West Pesisir Regency government, especially the West Pesisir Regency Tourism Office, must have a creative spirit so that the development of Banana Island tourism continues.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan suatu sektor industri terpenting pada suatu Negara untuk meningkatkan perekonomian Negara. Masa era globalisasi saat ini dapat di lihat banyaknya penduduk di dunia gemar melakukan perjalanan wisata. Peningkatan jumlah wisatawan dapat menjadikan pariwisata menjadi lahan yang sangat menguntungkan bagi setiap Negara.

Sektor pariwisata merupakan salah satu industri strategis, hal ini disebabkan devisa yang didapat banyak dari sektor pariwisata. Berbagai Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank dunia dan World Tourism Organization (WTO) mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama keterkaitan dengan bidang sosial dan ekonomi. Perkembangan pariwisata dapat menghidupkan banyak usaha kecil sektor informal yang terkait dengan kegiatan wisata antara lain pedagang asongan, warung, penjualan souvenir dan jasa pemandu wisata. Selain itu pariwisata memiliki manfaat yang signifikan dalam memperluas lapangan dan kesempatan kerja pada bidang-bidang usaha pariwisata dan terkait dengan industri pariwisata. Sangatlah tepat kalau pariwisata untuk dikembangkan sebagai salah satu penggerak utama perekonomian, karena mempunyai potensi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan penerimaan pendapatan daerah. Selain itu, sektor pariwisata mempunyai multiplier effect yang sangat luas, karena hampir seluruh sektor kegiatan seperti jasa, industri, transportasi, pertanian dan perdagangan dapat dihubungkan dengan dunia kepariwisataan, sehingga dampak pariwisata dapat secara langsung maupun tidak langsung terhadap ekonomi suatu daerah.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, beberapa istilah yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata antara lain:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
- e. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- f. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya Tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

- a. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata.
- b. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa.
- c. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
- d. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat sedang mengupayakan beberapa langkah strategis demi memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Barat. Rencana ini kemudian dituangkan ke dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesisir Barat. Adapun pokok dari RIPPDA Kabupaten Pesisir Barat adalah mengembangkan pariwisata berbasis wisata alam dan budaya dengan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya yang dilakukan melalui peningkatan sinergitas pariwisata dengan sektor potensial (bahari, religi/budaya, ekowisata maupun event wisata), pengembangan obyek wisata potensial dengan meningkatkan aspek pemasaran pariwisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan infrastruktur pendukung bagi pengembangan kawasan pariwisata potensial upaya tersebut dilakukan pemerintah daerah kabupaten pesisir barat dalam rangka untuk memaksimalkan potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pemerintah daerah setempat telah menetapkan Peraturan daerah Nomor 03 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesisir Barat adalah dasar dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan

program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.

Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan daerah otonomi baru (DOB) hasil dari pemekaran Kabupaten Lampung Barat (LAMBAR) sangat kaya dengan potensi alam, budaya dan pariwisata. Wisata bahari menjadi sektor unggulan, karena Kabupaten Pesisir Barat memiliki banyak pantai dengan jenis ombak yang berkualitas Internasional sehingga sering dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang suka berselancar, selain wisata bahari, adapun wisata lainnya seperti wisata religi/budaya, ekowisata dan event wisata lainnya.

Berdasarkan potensi, pengembangan pariwisata secara utuh dan terpadu perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomis serta melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Secara objektif merupakan kegiatan perdagangan jasa yang berbasis pada potensi-potensi ekonomi dan non ekonomi, yakni mulai dari sumber daya alam sampai sumber daya sosial budaya masyarakat. Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi destinasi pariwisata bahari yang besar di Provinsi Lampung dengan panjang pantainya 210 Km. Salah satu destinasi wisata bahari di Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki potensi jika dikembangkan dan diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yaitu Kecamatan Pulau Pisang. Pulau Pisang adalah pulau yang terletak di sebelah barat Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dengan jarak 5 Km dari pusat kota dan terhubung langsung dengan Samudra Hindia. Pulau Pisang merupakan pulau karang kecil yang terletak dalam wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Barat yang terdiri dari enam Desa yaitu Desa Labuh, Desa Sukadana, Desa Lok, Desa Bandar Dalam, dan Desa Pasar Ulu yang masuk dalam satu Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung yang dikelilingi karang dan kaya dengan sumber daya.

Hasil dari Observasi lapangan destinasi wisata lainnya selain terkenal dengan keindahan pesona pantainya, pulau Pisang juga terkenal dengan wisatawan budaya dan sejarah yang masih menjadi budaya masyarakat pulau Pisang saat ini, salah satu budaya pulau Pisang saat ini adalah tapis tenun yang terkenal dan merupakan tapis tenun tradisional yang terbaik di Sumatera, tak heran banyak para pengunjung memburu tapis tenun dari pulau Pisang yang beragam macam bentuknya mulai dari tulisan ayat kursi sampai gambar pohon dan lainnya. Tradisi Marga Sai Batin Pulau Pisang mengharuskan warganya menenun kain Tapis dan Benang Emas. Kain tenun yang biasa bermotif gajah atau perahu ini juga bisa menjadi souvenir khas Pulau Pisang. Selain membuat kain Tapis ibu-ibu warga Pulau Pisang membuat kain Tenun Beludu. Menurut warga Pulau Pisang kegunaan kain Tapis dan Beludu berbeda fungsinya. Kain Tenun Beludu biasa digunakan untuk pelaminan nikahan atau saat acara adat nikahan tersebut. Menenun Tapis menjadi salah satu wisata unggulan untuk menarik wisatawan, disini wisatawan bisa ikut langsung membuat dan melihat proses dari pembuatan tenun Tapis Pulau Pisang. Dalam proses pembuatannya mayoritas dilakukan oleh ibu-ibu dan ada juga remaja putrid yang baru belajar. Pembuatan kain Tapis memerlukan waktu yang lama ini karena dikerjakan menggunakan tangan bukan menggunakan mesin.

Akan tetapi pada kenyataannya pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung belum optimal dalam mengembangkan wisata bahari Pulau Pisang. Misalnya Sarana dan Prasarana menuju Pulau Pisang masih menggunakan kapal laut tradisional. Selain itu, minimnya sarana penunjang pariwisata seperti penyediaan akomodasi alat penyelaman, penyediaan makan minum, perhotelan dan penginapan, penyediaan angkutan wisata dan hiburan umum merupakan indikator rendahnya pembangunan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Sumber daya pariwisata Kabupaten Pesisir Barat masih memerlukan sentuhan kreatif dan profesional, untuk menjadikan objek dan daya tarik wisata sehingga dapat menjadi produk wisata yang bernilai jual diperlukan langkah strategis.

LANDASAN TEORI

Strategi secara etimologi berasal dari kata *strategos* (jenderal) yang merupakan bahasa Yunani Klasik yang pada dasarnya diambil dari pilihan kata-kata Yunani untuk pasukan dan memimpin. Penggunaan kata kerja Yunani yang berhubungan dengan *strategos* ini dapat diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki atau bisa diartikan sebagai seni yang biasa digunakan oleh panglima dalam sebuah peperangan supaya kelompoknya bisa menang, sesuai definisi Bracker dalam Heene Dkk (2010:53).

Menurut Viljoen dalam Heene Dkk (2010:76) mengutarakan sebuah penafsiran yang sangat rinci dengan mengasumsikan bahwa manajemen strategik adalah suatu proses dari “pengidentifikasian, pemilihan, dan pengimplementasian aktivitas-aktivitas yang dapat memperbaiki kinerja jangka panjang dari organisasi, melalui penentuan arah disertai melanjutkan komitmen maupaun penyesuaian antara keterampilan internal dengan sarana-sarana dari organisasi berikut pula dengan lingkungan yang

berubah evolutif di mana organisasi itu beroperasi”.

James Brian Quinn (Mintzberg, Henry dkk, 2003) analisis strategi diplomatik dan analogi-analogi yang serupa dan bidang lain menyediakan beberapa wawasan penting ke dalam dimensi dasar, sifat dan desain strategi formal. Yaitu strategi efektif mengandung tiga unsur yang terdapat dalam buku *The Strategy Process* yaitu Tujuan, Kebijakan, dan Program.

Jadi strategi menentukan arah keseluruhan dan tindakan fokus organisasi, formulasinya tidak dapat dianggap sebagai generasi belaka dan keselarasan program untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pembangunan merupakan bagian integral dari strategi formulasi. Dewasa ini istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi dan ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis strategi yang diterapkannya, karena dalam arti yang sesungguhnya, manajemen puncak memang terlibat dalam suatu “peperangan” tertentu.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian dengan metode kualitatif deskriptif yaitu menurut Sugiyono (2015 : 9) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, untuk mendapatkan data yang mendalam dengan peneliti sebagai instrumen kunci.

Burhan (2005 : 24) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Adapun aspek yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori menurut James Brian Quinn (Mintzberg, Henry dkk, 2003) yang dikaitkan dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 pasal 10 Bab V Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesisir Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik menurut Sugiyono (2015: 63) yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Penelitian dilakukan di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung serta penelitian juga dilakukan di lokasi objek wisata bahari Pulau Pisang. Informan dalam penelitian ini terbagi atas 2 jenis informan yaitu informan inti dan informan pendukung. Dalam melakukan penelitian, peneliti mengumpulkan data berupa fakta mengenai permasalahan dan strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pengembangan Objek Wisata Bahari Pulau Pisang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada 3 Aspek yang berdasarkan Teori James Brian Quinn yaitu Aspek Tujuan, Aspek Kebijakan, dan Aspek Program dan 8 sub-aspek yang peneliti gunakan terkait dengan Peraturan Daerah tentang kepariwisataan Kabupaten Pesisir Barat No 03 Tahun 2017 untuk menjelaskan judul penelitian yang peneliti lakukan dengan judul Strategi Pengembangan Wisata Bahari Pulau Pisang (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat) aspek tentang peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat No 03 Tahun 2017 tentang RIPPDA. Tiga Aspek dan 8 sub aspek tersebut dapat peneliti sampaikan kedalam beberapa bagian sebagai berikut dibawah ini:

Aspek Tujuan

Teori James Brian Quinn menjelaskan bahwa tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai organisasi/instansi. Tujuan juga merupakan salah satu dimensi yang dapat menciptakan sebuah strategi karena penetapan tujuan sangat berkaitan langsung dengan strategi. Sehingga dengan melihat pada hasil penelitian tentang tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat di dalam mengembangkan pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, peneliti melihat Dinas Pariwisata telah memiliki tujuan yang jelas.

a. Penetapan Kawasan Peruntukkan Pariwisata

Terkait dengan pengembangan pariwisata Kabupaten Pesisir Barat khususnya objek wisata Pulau Pisang yang telah dibahas sebelumnya, yaitu: Sesuai dengan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat RIPPDA No 03 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Penetapan Kawasan Peruntukkan Pariwisata, penetapan zona pengembangan pariwisata, dan pengembangan usaha pariwisata merupakan hasil yang ingin dicapai organisasi/instansi. Penetapan Zona pengembangan pariwisata ini juga merupakan salah satu dimensi yang dapat menciptakan sebuah strategi karena penetapan kawasan peruntukkan pariwisata sangat berkaitan langsung dengan strategi. Sehingga dengan melihat pada hasil penelitian tentang penetapan peruntukkan pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat di dalam mengembangkan pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, peneliti melihat Dinas Pariwisata telah memiliki penetapan kawasan peruntukkan

pariwisata yang jelas mengenai pengembangan pariwisata pulau pisang Kabupaten Pesisir Barat, yaitu:

- 1) Menjadikan pulau pisang destinasi unggulan yang ada di kabupaten pesisir barat.
- 2) Penetapan kawasan pulau pisang ini sudah tertuang di dalam peraturan daerah no 03 tahun 2017 yang telah sesuai dengan prosedur dan objek wisata yang layak menjadi destinasi unggulan wisata Kabupaten Pesisir Barat yaitu Pulau Pisang.
- 3) Mengembangkan kepariwisataan yang berkelanjutan sehingga mampu berdaya saing ditingkat nasional serta mampu mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat.
- 4) Melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, kebudayaan, sejarah dan kepurbakalaan berdasarkan nilai-nilai luhur, moral, dan kearifan lokal.
- 5) Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Penetapan kawasan peruntukkan Pariwisata tersebut di atas tertuang dalam misi Dinas Pariwisata periode 2017-2021. Yang mana penetapan kawasan pariwisata yang telah dibuat akan menjadi langkah Dinas Pariwisata dalam mengembangkan kepariwisataan kabupaten pesisir barat pada umumnya dan pariwisata Pulau Pisang pada khususnya. Dan Dinas Pariwisata juga telah menjadikan Pulau Pisang sebagai salah satu destinasi wisata bahari dengan pertimbangan keindahan alam dan kekayaan alam bahari Pulau Pisang yang telah diakui oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Dengan pengembangan yang telah ditetapkan, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Bupati Pesisir Barat) dalam kesempatannya juga telah meninjau secara langsung kelokasi Pulau Pisang. Sehingga dengan melihat penetapan rencana pengembangan yang telah di buat dan di tetapkan oleh Dinas Pariwisata kabupaten pesisir barat, dan dengan telah dilakukannya peninjauan langsung objek wisata Pulau Pisang oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, sehingga pada aspek penetapan kawasan peruntukkan pariwisata peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Pariwisata telah memiliki penetapan kawasan peruntukkan pariwisata di pulau pisang dalam mengembangkan pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

b. Penetapan Zona Pengembangan Pariwisata

Dinas pariwisata kabupaten pesisir barat telah menetapkan zona pengembangan pariwisata yang unggul, ada beberapa penetapan zona pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh dinas pariwisata kabupaten pesisir barat salah satunya menetapkan objek wisata dan menjaga ekosistem laut flora dan fauna yaitu ekosistem lumba-lumba. Selain itu juga objek wisata yang sangat baik yaitu dermaga. Pantai ini airnya biru dan tidak ada ombak sehingga para pengunjung sangat tertarik untuk mandi. Pemerintah dinas pariwisata kabupaten pesisir barat terus melakukan upaya untuk pembangunan pulau pisang salah satunya ingin membangun fasilitas yang lebih baik lagi di area objek tersebut. Upaya ini sudah di buat jauh-jauh hari, tetapi menurut data dan wawancara yang kita peroleh di lapangan permasalahannya anggaran yang tidak turun. Disinilah peran dinas pariwisata agar memikirkan dan tidak mengandalkan anggaran dari pusat saja, tetapi harus menggandeng dan bersinergi dengan pihak swasta dan cerdas dalam membangun fasilitas objek yang seharusnya tidak mengandalkan dari anggaran pusat saja, tetapi lebih kepada anggaran daerah sendiri.

c. Pengembangan Usaha Pariwisata

Pengembangan usaha pariwisata ini sudah dilaksanakan oleh dinas pariwisata kabupaten pesisir barat dengan cara memberikan pelatihan khusus bagi masyarakat pulau pisang. Pelatihan tersebut salah satunya tentang pelatihan membuat souvenir kerajinan tangan yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata kabupaten pesisir barat.

Aspek Kebijakan

Tujuan akan dapat dicapai apabila didukung dengan adanya kebijakan yang tepat dari suatu organisasi/instansi. Sehingga James Brian Quinn menjelaskan bahwa Kebijakan merupakan rangkaian keputusan yang membimbing dan membatasi tindakan yang dilakukan, kebijakan dibuat untuk menetapkan arah suatu tujuan yang ditetapkan sehingga pembuatan kebijakan lebih memudahkan untuk mengarahkan suatu organisasi atau instansi dalam penerapan strategi.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Terkait dengan pengembangan sumber daya manusia apabila melihat pada hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kebijakan apa yang telah dibuat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat untuk mengembangkan sumber daya manusia, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kebijakan yang di buat dan di putuskan oleh dinas pariwisata kabupaten pesisir barat. Terkait dengan pengembangan sumber daya manusia salah satu kebijakn yang dibuat adanya pelatihan

yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata kabupaten pesisir barat untuk memberikan suatu pelatihan khusus untuk pegawai internal.

b. Pengembangan Kelembagaan

Terkait dengan pengembangan kelembagaan yang di selenggarakan oleh dinas pariwisata kabupaten pesisir barat dengan cara memberikan suatu pelatihan, artinya bahwa sudah selayaknya dan sepatutnya bekerja dengan baik, dikarenakan kepala dinas sendiri selalu memberikan suatu solusi apabila ada pegawai yang memang tidak bekerja secara profesional. Ditambah posisi jabatan harus sesuai beground pendidikan ini merupakan langkah yang kongkrit dalam sebuah pekerjaan agar pekerjaan yang dilakukan memang benar-benar di kerjakan oleh kualitas dan kapasitas sumber daya manuisa yang berkompeten dan berkualitas.

c. Pengembangan Fasilitas Penunjang

Pengembangan fasilitas penunjang Pulau Pisang, maka hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kebijakan yang dibuat dan diputuskan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat untuk pengembangan fasilitas penunjang. Tetapi ada beberapa hal yang tidak terealisasi di karenakan kebijakan tersebut keterbatasan dana dan belum dianggarkannya anggaran untuk pengembangan Pulau Pisang. Karena pada dasarnya suatu kebijakan akan dapat dilaksanakan apabila didukung dengan ketersediaan anggaran atau dana. Apalagi didalam kepariwisataan seperti pembuatan kebijakan pengembangan fasilitas yang unggul, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan kelembagaan dan kebijakan dalam penguatan kepariwisataan sangat tergantung dengan jumlah anggaran.

Aspek Program

Selain itu tujuan juga dapat dicapai apabila didukung oleh pembuatan program-program yang berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan Selain 2 pendapat diatas, James Brian Quinn juga berpendapat bahwa Program merupakan urutan-urutan tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Program dimaksudkan untuk mengatur segala tindakan yang akan dilakukan sehingga strategi yang akan diterapkan dapat terlaksana dengan maksimal. Sehingga pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti melihat program-program yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya seperti pada aspek pertama diatas.

Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat telah membuat 8 program utama pengembangan pariwisata bahari Pulau Pisang yaitu penetapan kawasan peruntukkan pariwisata, penetapan zona pengembangan pariwisata, pengembangan usaha pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, pengembangan fasilitas penunjang, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan pasar pariwisata. Dari 8 program ini hanya 1 program (pembangunan fasilitas) yang belum bisa dilaksanakan. Adapun tidak dapat dijalankannya program pembangunan fasilitas dikarenakan pada tahun 2018 tidak adanya anggaran dana yang bisa digunakan untuk membangun fasilitas Pulau Pisang. Akan tetapi yang sangat disayangkan, peneliti menilai bahwa Dinas Pariwisata dapat menggandeng pihak ketiga untuk dapat membangun fasilitas yang ada di Pulau Pisang demi tercapainya tujuan yang telah di tetapkan. karena melihat potensi yang sangat kaya akan keindahan dan bahari di Pulau Pisang, peneliti menilai pihak ketiga akan bersedia untuk membangun fasilitas di Pulau Pisang. Akan tetapi diperlukan dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagai pemegang kendali Pulau Pisang.

Menurut Brahmantyo dkk (2001) Strategi adalah cara untuk menjalankan sebuah misi guna mewujudkan atau mencapai sebuah visi yang diharapkan, yang dijabarkan dalam rencana suatu program kegiatan. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat telah memiliki strategi untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan pada aspek tujuan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat telah membuat 8 program yang masuk di dalam Peraturan Daerah N0 03 Tahun 2017 tentang rencana pengembangan pulau pisang., selain itu telah melakukan pembinaan operator sebagai orang yang terlibat dan bertemu langsung dengan wisatawan yang berkunjung di pulau pisang. Dan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat akan melakukan pembangunan sarana prasarana atau fasilitas di Pulau Pisang sebagai penunjang dalam pengembangan nya. Strategi yang yang dibuat dalam rangka mewujudkan visi pariwisata Kabupaten Pesisir Barat yaitu "Terwujudnya Daerah Tujuan Wisata yang Unggul berdaya saing Berkelanjutan dan mampu mendorong Pembangunan Daerah untuk menuju masyarakat Pesisir Barat yang madani, mandiri dan sejahtera".

Telah berangsur-angsur dilakukan sebagaimana yang telah peneliti sampaikan sebelumnya. Karena untuk mewujudkan visi menjadi kota tujuan wisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung perlu memiliki tujuan yang jelas, kebijakan, serta program yang benar-benar nyata

didalam lingkungan wisata, terutama di wilayah objek wisata Pulau Pisang yang telah memiliki keindahan, kekayaan bahari, dan juga telah banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian strategi yang diuraikan kedalam tujuan, kebijakan, dan program tersebut harus terus dijalankan dan dapat dijadikan prioritas dalam pengembangan pariwisata Pulau Pisang serta dengan adanya tujuan, kebijakan, dan program maka misi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas Aparatur yang memiliki keahlian dan keterampilan dibidang seni, budaya, Pariwisata dan industri kreatif pariwisata.
- 2) Melestarikan dan mengembangkan seni budaya peninggalan bersejarah, Nilai-nilai tradisional.
- 3) Meningkatkan mutu produk dan pelayanan serta pengembangan usaha Pariwisata
- 4) Meningkatkan pengembangan Destinasi Pariwisata yang berbasis pada lingkungan dan perencanaan yang komprehensif.
- 5) Meningkatkan arus kunjungan wisatawan melalui promosi kerjasama antara lembaga serta wisatawan.
- 6) Meningkatkan peran serta masyarakat melalui bina masyarakat sadar wisata dan penggalangan sapta pesona.

Hal ini juga dapat diwujudkan dan mampu mewujudkan visi yang telah diuraikan diatas. Karena apa yang peneliti sampaikan juga telah sesuai dengan teori menurut Suryono (2004:80) bahwa strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan Kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana. Sarana prasarana yang telah berdiri di Pulau Pisang merupakan rangkaian strategi untuk mengembangkan wisata bahari Pulau Pisang yaitu telah berdirinya sarana prasarana tower, Home Stay, dan listr. Selain itu peik bawah laut, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah meninjau langsung lokasi Pulau Pisang dengan program bahwa akan dibangun fasilitas-fasilitas di Pulau Pisang. Hal ini merupakan langkah awal strategi pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Dinas Pariwisata dalam melaksanakan pengembangan Pulau Pisang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan telah dilakukan pembahasan pada bab sebelumnya. Penelitian dengan judul Strategi Pengembangan Wisata Bahari Pulau Pisang Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Aspek tujuan peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Pariwisata telah memiliki tujuan yang jelas dalam mengembangkan pariwisata pulau pisang.
2. Aspek Kebijakan peneliti menyimpulkan terdapat kebijakan yang dibuat dan diputuskan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten pesisir barat untuk meningkatkan pengembangan fasilitas penunjang. Tetapi kebijakan tersebut tidak dapat di buat dikarenakan keterbatasan dana dan belum dianggarkannya anggaran untuk pengembangan Pulau Pisang.
3. Pada Aspek Program, Dinas Pariwisata telah membuat 8 program utama pengembangan pariwisata bahari Pulau Pisang yaitu penetapan kawasan peruntukkan pariwisata, penetapan zona pengembangan pariwisata, pengembagan usaha pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, pengembagan kelembagaan, pengembangan fasilitas penunjang, pengelolaan lingkungan, pengembagn pasar pariwisata. Dari 8 program tersebut yang terkait hanya 7 program yang telah berhasil dijalankan. Dan 1 program (pembangunan fasilitas) yang belum bisa dilaksanakan.

Dengan hasil penelitian dan pembahasan pada ke-3 aspek diatas, maka pada penelitian dengan judul tesis tersebut diatas peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Pariwisata telah melakukan strategi pengembangan wisata bahari Pulau Pisang.

Saran

1. Untuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pulau Pisang, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat agar dapat meningkatkan pembangunan terkait objek wisata yang ada serta kenyamanan bagi pengunjung yang setiap saat datang. kebijakan untuk membuat zona pengembangan objek wisata ini sangat perlu terkait dengan keindahan dan kenyamanan bagi pengunjung wisata pulau pisang.
2. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dapat membangun infrastruktur dan fasilitas penunjang yang ada di Pulau Pisang. Seperti fasilitas Penginapan Yang Berkualitas, Toilet dan lain-lain.

3. Untuk pengelolaan lingkungan sebaiknya pemerintah kabupaten pesisir barat di setiap sisi menyediakan tempat sampah para pengunjung sehingga kebersihan pantai akan selalu terlihat. Serta dalam hal pengembangan pasar pariwisata selain rumah makan tadi, dan penjualan sovenir, sebaiknya pemerintah kabupaten pesisir barat memberikan modal agar kerajinan tangan ini dapat teralisasi dengan baik antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Oka A. Yoeti. Drs., MBA. 1990. Pengantar Ilmu Pariwisata. Penerbit Angkasa. Bandung.
- Heene Dkk. 2010. Manajemen Strategik Keorganisasian Publik. Refika Aditama, Bandung.
- Hutabarat, Jemsly dan Huseini, Martani. 2006. Manajemen Strategik Kontemporer. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Kurniawan, Luki astuti Fitri & Hamdani, Muliawan. 2008. Manajemen Strategik dalam Organisasi. MedPress. Yogyakarta.
- Mappi, Sammeng, Andi. 2001. Cakrawala Pariwisata. Balai Pustaka. Jakarta.
- Mintzberg, Henry.dkk. 2003. The Strategy Process. Edisi Keempat. New Jersey: Upper Saddle River.
- Pitana, I Gede. 2005. Sosiologi Pariwisata. ANDI. Yogyakarta Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan. Penerbit Kanisius.Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. R Dan D, Alfabeta, Bandung.
- Spillane. JamesJ. 1987.Ekonomi Pariwisata.Kanisius, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RND. Alfabeta. Bandung.
- Suwantoro, G. 1997. Dasar-dasar Pariwisata. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Suryono, Agus. 2004. Pengantar Teori Pembangunan. Universitas Negeri Malang. Malang.
- Tim Litbang Kebahasaan Genesis. 2016. Ejaan Yang Disempurnakan Berdasarkan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015. Frasa Lingua. Yogyakarta.
- Wahab, S. 2001. Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Wahab. 2003. Manajemen Kepariwisata. Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Yoeti. OkaA. 2008. Perencanaandan Pengembangan Pariwisata., PradayaPratama, Jakarta.
- Ian Asriandy. 2016. Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Bissapu Di Kabupaten Bantaeng.Universitas Hassanudin.
- Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Kepariwisata.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/geografi-ind>